

**ANTHROPOS:**  
**Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya**

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>



---

**Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam Pilkada di  
Kabupaten Karo**

**Herty Delima Purba\*, M. Arif Nasution, & Warjio**

Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara  
Indonesia

---

**Abstrak**

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan otoritas atau mempengaruhi pemilihan pejabat negara dan/atau tindakan yang diambil oleh mereka, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakan publik). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Karo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara kuantitas, keterlibatan perempuan di kantor politik di Kabupaten Karo masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada dan hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat di kantor politik dan yang tidak terlibat. Dibandingkan dengan daerah lain, perempuan di Kabupaten Karo dalam hal keterlibatan dalam politik karena kepala daerah kurang. Dalam dua periode pemilihan kepala daerah, pada tahun 2010 dan 2015 hanya ada satu kader yang mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. Pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentu berbeda, untuk mengakomodasi dan memahami masalah perempuan dan untuk merumuskan kebijakan ideologi yang lebih ideal jika perempuan berpartisipasi aktif dalam pembuatannya.

**Kata Kunci:** Partisipasi. Kader Perempuan, Pilkada

**Abstract**

*Political participation is the voluntary activity of a person or group to participate actively in political life by taking part in the electoral process of the authorities or influencing the selection of state officials and/or actions taken by them, and directly or indirectly influence government policy (public policy). The type of research used by researchers in this study is a qualitative approach with descriptive study. This research was conducted in Karo Regency precisely in Karo Regency parliament office. The results of this study explain that in quantity, the involvement of women in political office in Karo Regency is still lacking. This can be seen from the existing data and the results of interviews with various informants involved in political office and who are not involved. Compared to other regions, women in Karo District in terms of involvement in politics as regional heads are lacking. In two periods of regional head elections, in 2010 and 2015 there was only one cadre nominating himself as regional head. Basically the needs of women and men are certainly different, to accommodate and understand the problems of women and to formulate a more ideal ideological policy if women participate actively in the making.*

**Keywords:** Participation. Female Cadres, Pilkada

**How to Cite:** Purba, H.D. Nasution, M.A. & Warjio (2018), Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam Pilkada di Kabupaten Karo. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4 (1): 23-30

\*Corresponding author:

E-mail: [hertydelimapurba@gmail.com](mailto:hertydelimapurba@gmail.com)

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi politik merupakan salah satu syarat utama demi tegak dan berjalannya demokrasi. Demokrasi juga berarti keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Sedangkan sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat negara atau tindakan secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, maka yang terjadi adalah representasi perempuan yang rendah didalamnya.

Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya pengambilan keputusan dimana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengena kepada mereka. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil dan bahkan melanggar hak asasi manusia, jika perempuan masih juga dimarginalisasikan. Partisipasi perempuan dibidang politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya.

Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.

Perempuan sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Yang seharusnya pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang sepuluh atau dua puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah bisa dan biasa dilakukan perempuan, termasuk pekerjaan kasar sekalipun.

Diantara sektor-sektor publik yang telah dimasuki perempuan, sektor politik merupakan hal yang sangat menarik sekaligus sangat penting. Menarik karena secara historis memang sangat kecil keterlibatan perempuan dalam politik praktis.

Peran perempuan dalam politik di Indonesia saat ini memang semakin kuat, hal itu terlihat makin banyaknya kepala daerah, anggota DPR, bahkan para menteri yang dijabat seorang wanita. Bukan hanya menjabat namun kekuatan mereka mampu merubah Indonesia dalam hal positif. Peran perempuan dalam dunia politik Indonesia memang akan menjadi sebuah warna tersendiri bahkan dengan segala sifat kewanitaannya hal itu akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia.

Partisipasi dan keterwakilan mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran tersebut juga harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan di DPRD serta pengambilan keputusan, namun peranan perempuan pada jabatan-jabatan tersebut di Kabupaten Karo nampaknya masih kurang.

Dunia politik dalam pemilu maupun pilkada tidak hanya menjadi dominan kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga harus ikut ambil bagian dalam kancah politik, untuk mendorong kader-kader perempuan potensial menduduki posisi penting pengambilan keputusan seperti halnya pada pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan kesejahteraan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, baik Gubernur dan wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Walikota, secara langsung merupakan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Tetapi yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Karo sejak Periode tahun 2010 dan Periode 2015, tampak tiga kader perempuan yang ikut terlibat dalam aktivitas riil politik pada proses pelaksanaan pilkada langsung tersebut, terutama pada kegiatan politik pada partai masing-masing. Hal ini dikarenakan para kader perempuan yang tidak berminat untuk terlibat kedalam aktifitas riil politik pada pelaksanaan Pilkada. Kondisi itu juga semakin dipersulit oleh aturan dan pola yang diberlakukan partai yang tentu tidak mudah bagi perempuan untuk dapat menembusnya.

Gambaran pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karo tersebut, tentu saja menimbulkan sejumlah pertanyaan yaitu mengapa partisipasi politik perempuan masih rendah walaupun telah ada gerakan feminisme yang bisa menjadi loncatan bagi terwujudnya peningkatan partisipasi politik perempuan. Kondisi demikian berarti disebabkan adanya sejumlah kendala yang menghambat perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik didalam partai khususnya.

Oleh karena itu sangat perlu kiranya digali lebih dalam lagi kendala apa yang dihadapi oleh para kader perempuan sehingga menyebabkan para kader perempuan partai politik tersebut tidak dapat terlibat secara penuh dalam proses pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Karo sejak pertama kali dilakukan Pilkada langsung berjalan dengan sukses.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Karo, yang dimana di kantor tersebut terdapat kader perempuan parpol sebagai informan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi untuk memperoleh data dari penelitian ini adalah dengan menetapkan beberapa kriteria antara lain: Kader Perempuan Partai Politik yang

sudah bergabung dalam parpol diatas 5 tahun, sebanyak 6 orang, Perempuan Asli Kabupaten Karo sebanyak 3 orang serta Wakil Bupati Kabupaten Karo saat ini.

Data primer dikumpulkan melalui melalui observasi atau pengamatan secara langsung serta wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, buku, serta jurnal.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Eksistensi perempuan dalam jabatan-jabatan politik seperti salah satunya adalah bupati atau wakil bupati dalam sebuah daerah tentunya dapat dilihat dari jumlah atau kuantitas mereka di dalamnya. Tingkat partisipasi perempuan menggambarkan minat para perempuan-perempuan untuk mulai memberdayakan dirinya termasuk dalam ikut merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak dan memberi kontribusi yang besar bagi daerahnya.

Keterlibatan perempuan dalam kontes pilkada di setiap daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator-indikator untuk mengetahui sejauh mana perempuan mengepakkan sayapnya di dunia politik. Berikut beberapa indikatornya:

##### **1. Jumlah Perempuan dalam Kontestasi Pilkada di Kabupaten Karo.**

Dari data-data yang peneliti dapatkan, Kabupaten Karo hingga saat ini masih menampakkan kesenjangan jumlah perempuan-perempuan yang menduduki kursi-kursi politik. Dapat kita lihat misalnya saja dari desa-desa yang sampai saat ini masih banyak dipimpin oleh kepala desa seorang laki-laki.

Perempuan juga memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Namun dari data pengamatan dan wawancara langsung yang peneliti dapatkan, jumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Karo hanya ada 7 orang dari 35 anggota DPRD.

Dengan jumlah yang sedikit ini pula berakibat pada kebijakan-kebijakan yang pro kepada perempuan akan sulit untuk dilaksanakan. Sebagai perumus kebijakan memang dibutuhkan jumlah perempuan yang lebih banyak lagi, setidaknya meningkat dari angka 7. Hal ini tentu berpengaruh kepada pemilihan kepala daerah yang jarang terlihat ada calon dari perempuan. Karena

untuk mencalonkan diri menjadi calon dalam pilkada harus mendapatkan dukungan dari partai politik. Hal ini dibuktikan dalam dua kali periode pilkada di Kabupaten Karo hanya sedikit ada kader perempuan partai yang dicalonkan oleh partai untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati.

## **2. Pandangan Perempuan terhadap Politik dan Pilkada**

Untuk melihat tingkat partisipasi dan minat perempuan dalam jabatan politik khususnya jabatan kepala daerah, peneliti ingin mengkaji pandangan dan pemahaman dasar perempuan-perempuan di Kabupaten Karo tentang dunia politik. Pandangan perempuan-perempuan mengenai dunia politik tentunya akan berkaitan erat dengan minat mereka melangkah kakinya untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

Jabatan politik memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat. Tidak memiliki pola pikir yang tertutup cenderung tidak menerima perbedaan. Karena setiap orang dalam politik memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Lebih khusus politik tidak mengenal perbedaan jenis kelamin tapi lebih kepada kemampuan seseorang dalam memberi pengaruh dan perubahan yang baik pada sebuah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat kita analisis bahwa masyarakat saat ini sangat mengharapkan politik yang lebih sehat. Politik tidak hanya berhubungan dengan materi dan kedudukan semata, tetapi merupakan jalan yang harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan bersama bukan hanya kehidupan pribadi ataupun partai yang mengusungnya.

Menurut ibu Wakil Bupati Kabupaten Karo Corry Sibayang, baik itu negara atau pemerintah sudah memberi peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk berperan dalam arus perpolitikan negara kita tanpa ada deskriminasi seperti zaman dahulu kala ketika perempuan hanya tinggal di rumah saja. Perempuan sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi, berkualitas dan dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaganya dalam dunia politik.

Meski peluang terus dibuka untuk eksistensi perempuan di bidang politik namun jika pikiran-pikiran yang seperti itu terus menggerogoti para perempuan maka minat akan susah untuk diberdayakan. Negara pada umumnya dan daerah

pada khususnya masih membutuhkan peran putri bangsa untuk sama-sama berjuang mencapai kesejahteraan bersama.

Jadi dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa politik bukan hal yang instan, tapi sebuah kekuatan dan kapabilitas yang diasah terus menerus untuk memperoleh kekuasaan dengan membekalkan diri dengan pengalaman dan pemahaman yang matang dan niat yang tulus untuk kesejahteraan bersama.

## **3. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Kader Perempuan Dalam Kontestasi Politik**

Dengan melihat kurangnya partisipasi perempuan dalam politik seperti dalam pilkada di Kabupaten Karo tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang peneliti kaji melalui pengamatan, literatur serta hasil wawancara dengan berbagai informan adalah sebagai berikut:

### **a) Faktor Internal**

#### **1) Kapabilitas Kader Perempuan untuk Terlibat dalam Kontestasi Pilkada**

Berbicara tentang kapabilitas untuk terjun dalam dunia politik dan untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya hal yang menjadi landasan utama adalah dengan ukuran tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi. Kedua hal ini adalah bekal wajib agar perempuan yang berada dalam jabatan politik adalah insan-insan yang berkualitas.

Menurut penjelasan beberapa informan yang masing-masing berprofesi sebagai anggota DPRD dan Wakil Bupati Kabupaten Karo salah satu yang hal yang menyebabkan rendahnya kuantitas atau jumlah perempuan khususnya kader perempuan dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Karo bisa disebabkan dari akarnya, yakni masih rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan utamanya di pelosok-pelosok desa dibandingkan laki-laki.

Untuk menjadi seorang pemimpin dan pengambil keputusan misalnya untuk menjadi anggota DPRD bahkan menjadi Kepala Daerah, tentunya tidak hanya kemauan atau minat saja, tapi seorang perempuan khususnya kader parpol itu sebaiknya pula ditopang oleh tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang matang.

#### **2) Minat Kader Perempuan Untuk terlibat dalam Kontestasi Pilkada**

Pada faktor terakhir ini, peneliti mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan minat kader perempuan di Kabupaten Karo dalam arus

perpolitikan sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan. Melalui faktor-faktor yang telah dikaji sebelumnya, berbagai informasi dari informan-informan telah menjelaskan hal-hal yang menghambat keterlibatan perempuan dalam jabatan politik seperti dari sisi pendidikan, pengalaman organisasi, keuangan, budaya serta kebijakan.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki alasan untuk menjatuhkan sebuah pilihan dalam hidupnya. Begitu pula untuk terlibat dalam jabatan politik seperti kepala daerah adalah sebuah pilihan. Ibu Lesna br Sembiring sebagai ibu rumah tangga di wilayah pedesaan pada dasarnya menjelaskan hal yang serupa, mereka menampakkan harapan yang besar supaya perempuan-perempuan di Kabupaten Karo khususnya yang sudah terlibat dalam partai politik harus meningkatkan partisipasinya dalam politiknya dengan ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Perempuan akan bersaing ketat pada pemilihan anggota DPRD tahun ini. Peneliti berharap dengan peningkatan jumlah caleg tersebut berdampak baik bagi keterlibatan perempuan dalam kontestasi pilkada. Meningkatnya jumlah perempuan sebagai perumus kebijakan dalam tataran DPRD nantinya akan merambah juga pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam kontes-kontes politik setingkat pemilihan kepala daerah.

## **b) Faktor Eksternal**

### **1) Kebijakan Partai**

Kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan mulai terbuka lebar. Seperti UUD 1945 pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan pemerintahan.

INPRES RI No.9 tahun 2000 tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional, serta yang marak dibicarakan saat ini mengenai UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif pada pasal 53, 54 dan 55 yang menjelaskan pernyataan tentang 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan daerah sebagai salah satu persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Dalam hal kebijakan tersebut, perempuan telah diberi kesempatan untuk berpolitik demi pembangunan bangsa dan negara. Namun pada

kenyataannya peluang tersebut belum digunakan secara maksimal oleh perempuan. Menurut ibu Corry Sibayang selaku kader perempuan partai yang juga wakil bupati Kabupaten Karo pertama perempuan yang dipilih langsung oleh masyarakat Karo, menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan negara untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Tetapi untuk kebijakan perempuan mencalonkan diri kedalam pilkada sangat sedikit terjadi. Hal ini dikarenakan kebijakan dari setiap partai yang masih sangat kurang percaya kepada perempuan untuk bisa memenangkan suara.

Kebijakan yang lahir dari pemerintah tentang aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% merupakan sebuah jalan yang baik bagi perempuan-perempuan yang memiliki minat politik dan kepemimpinan untuk membekalkan dirinya jauh-jauh hari sebelumnya karena pada zaman sekarang ini tidak ada lagi deskriminasi atau marginalisasi bagi kaum perempuan.

Masih banyak partai politik yang memiliki kebijakan kurang berpihak kepada perempuan dalam hal pencalonan kadernya untuk maju dalam kontestasi politik. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka negara pada umumnya dan daerah pada khususnya membutuhkan perempuan yang berkualitas untuk menyumbangkan segenap pikiran dan tenaganya bersama kaum laki-laki untuk bekerja sama membangun bangsa yang lebih baik lagi. Tetapi tidak jarang juga para pengruus partai yang memang mengeluh bahwa sulitnya mendapatkan sosok kader perempuan yang tepat untuk dijadikan calon bupati atau gubernur.

### **2) Akseptabilitas dan Nilai Budaya Lokal di Kabupaten Karo**

Akseptabilitas masyarakat terhadap perempuan dalam jabatan politik khususnya dalam jabatan kepala daerah merupakan gambaran akan tingkat penerimaan masyarakat di Kabupaten Karo terhadap sosok perempuan dalam perpolitikan. Sedangkan nilai lokal merupakan sebuah budaya yang dimiliki oleh setiap daerah atau biasa disebut dengan kearifan lokal.

Peneliti mengkaji dua indikator tersebut untuk melihat lebih jauh mengenai pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap perempuan dalam jabatan politik khususnya kepala daerah serta nilai lokal yang ada di Kabupaten Karo ini

sehingga berpengaruh terhadap kurangnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Karo.

Menurut salah satu narasumber yakni ibu LS 48 Tahun sebagai Anggota DPRD menjelaskan bahwa masyarakat Tanah Karo saat ini sebenarnya sudah siap menerima kehadiran perempuan dalam perpolitikan. Hal ini dibuktikan dengan apresiasi dari warga desa yang mendukung dirinya selama pencalonan sampai akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD. Akan tetapi untuk menduduki sebagai kepala daerah atau dikatakan pemimpin, masyarakat masih memegang teguh budaya atau adat leluhur yang memang masih mengutamakan kepemimpinan laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kehadiran perempuan saat ini dalam politik sudah mulai mendapat dukungan dari masyarakat,

tetapi untuk keterlibatan dalam jabatan politik seperti kepala daerah masih sedikit memiliki yakni dengan adanya nilai lokal Patriarki. Dimana nilai yang menganut atau mengambil garis keturunan dari laki-laki sehingga terlihat sangat mengistimewakan laki-laki dari pada perempuan, maka masyarakat Suku Karo lebih menilai laki-laki lebih pas untuk menjadi pemimpin.

Dari pernyataan tersebut peneliti mendapat sebuah gambaran bahwa di Karo ada nilai lokal yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin, namun salah satu nilai atau makna dari nilai patriarki ini bisa menjadi motivasi bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memimpin sebuah daerah. Untuk lebih jelas secara terperinci berikut penjelasan melalui tabel matrik.

**Tabel Matrik**  
**Faktor Penghambat Kader Perempuan Partai Politik dalam Kontes Politik**

Informan	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
	Kapabilitas/Kemampuan	Minat	Kebijakan Partai	Nilai Budaya Lokal
CS	Kemampuan kader perempuan partai masih banyak yang kurang baik, masih perlu adanya pendidikan lebih, untuk perempuan yang belum bergabung di parpol harus meningkatkan keterlibatan perempuan di organisasi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat	Minat perempuan dalam politik sudah cukup kuat, melihat begitu banyaknya perempuan sebagai anggota DPRD yang bermunculan saat ini tetapi tidak berani untuk maju sebagai kepala daerah.	Masih banyak partai yang memiliki kebijakan kurang berpihak pada perempuan dalam pencalonan untuk maju dalam pilkada baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.	nilai lokal yang mengikat sebenarnya sudah mulai sedikit melonggar untuk perempuan, namun pikiran-pikiran perempuan itu sendiri yang belum terbuka.
EA	Kemampuan sudah mulai meningkat, khususnya perempuan Karo yang berada di Kota, seperti Brastagi. Tetapi untuk Perempuan di Desa masih belum.	Minat sudah sangat tinggi, terlihat dari setiap priode yang calon untuk anggota dewan, tetapi kalau untuk Pilkada masih banyak pertimbangan perempuan Karo.	Banyak kebijakan partai yang tidak bisa diterima oleh kodrat sebagai perempuan, misalnya harus kampanye ke daerah-daerah dari pagi sampai pagi lagi hingga urusan keuangan yang terlalu besar.	Budaya Patriarki masih melekat keras pada paradigma perempuan di pedesaan Kabupaten Karo. Menurut mereka semua urusan di luar rumah diserahkan pada laki-laki saja.

Berdasarkan tabel matrik tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa faktor penyebab tingkat partisipasi kader perempuan kab. Karo rendah diakrenakan dua faktor yakni internal dan eksternal. Internal yang paling dominan adalah minat dari kader perempuan itu sendiri sama halnya dengan faktor eksternal yakni kebijakan partai yang paling mendominasi menghambat perempuan untuk maju dalam kontes politik.

### **Keterkaitan Nilai Patriarki Terhadap Rendahnya Partisipasi Kader Perempuan dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Karo**

Keterlibatan kader perempuan partai politik dalam proses pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Namun perempuan tersebut tidak dapat berpartisipasi secara penuh karena dipengaruhi oleh beberapa kendala. Yang dimaksud kendala adalah hal-hal yang menahan atau merintanginya terjadinya suatu proses. Dalam penelitian ini, kendala yang dimaksud adalah hal-hal yang menahan atau merintanginya kader perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pelaksanaan pilkada pada partainya masing-masing.

Kendala yang dihadapi oleh kader perempuan di Kabupaten Karo ini umumnya berasal dari Budaya Patriarki Suku Karo sendiri, karena pada dasarnya partai politik telah memberikan kesempatan yang sama bagi kader perempuan untuk dapat terlibat penuh dalam kegiatan partai terutama pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karo.

Konsep patriarki pada saat ini menunjukkan bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industry, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama, pada dasarnya perempuan tercabut dari akses terhadap kekuasaan atau sama sekali tidak punya hak, pengaruh dan sumber daya, agaknya keseimbangan kekuasaan justru lebih menguntungkan bagi laki-laki, patriarki merembes ke semua aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial.

Setiap kekuasaan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki dikontrol oleh laki-laki. Perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat. Mereka secara ekonomi, sosial, politik, dan

psikologi tergantung pada laki-laki, khususnya dalam institusi pernikahan. Sehingga dalam keluarga maupun masyarakat perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Budaya patriarki memosisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah.

Hal lain yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi kader perempuan dalam kontestasi pilkada Kabupaten Karo ialah adanya persepsi masyarakat Suku Karo yang menganggap perempuan hanya tepat menjadi ibu rumah tangga dan tidak cocok untuk berperan aktif dalam memimpin suatu daerah. Setingginya jabatan perempuan dirasa cukup hanya sampai anggota DPRD saja.

### **SIMPULAN**

Secara kuantitas, keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Karo masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang ada serta hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam jabatan politik serta yang tidak terlibat. Dibandingkan dengan daerah lain maka perempuan di Kabupaten Karo dalam hal keterlibatan di dunia politik sebagai kepala daerah masih kurang. Pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan serta merumuskan kebijakan tantunya lebih idealnya jika perempuan ikut aktif dalam pembuatannya. Kesulitan perempuan untuk membagi waktu antara kegiatan di partai dan dalam keluarga karena keputusan-keputusan penting dalam partai umumnya dihasilkan pada rapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari. Hal ini membuat kader perempuan tersebut kesulitan untuk dapat mengikuti dan akibatnya mereka tidak bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam partai. Pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader perempuan masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut. Hal ini menyebabkan di dalam diri perempuan tersebut terbentuk persepsi/pandangan yang menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki seperti menjadi pemimpin. Persepsi

seperti ini masih menjangkiti diri perempuan karena kurang memahami pentingnya peranan mereka dalam pengambilan keputusan politik partai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas. (2006). *Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika*. Makassar: Eramedia
- Astuti, M.D. (2006). *Konteks Global dan Nasional Gerakan Perempuan di Masa Orde Baru: Kelahiran dan Dinamika Gerakan Yasanti*. Surabaya: Disertasi
- Fakih, M. (2004). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiz, L. (2004). *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Ihromi, T. O. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karam, A. (2003). *Partisipasi Politik Perempuan: Tinjauan Strategi dan Kecenderungan* dalam Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang Baik: Tantangan Abad 21, UNDP.
- Naqiyah, N. (2005). *Otonomi Perempuan*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Putra, D.K.S. (2012). *Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 41-47.
- Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 166-175
- Susi S dan Adelita L., (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1): 1-3.